

Nomor	: 036/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PELAYANAN PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA  
BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) PENYALUR  
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol / Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2009 tentang Formulir Isian Registrasi Cukai.

**DESKRIPSI :**

1. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Penyalur MMEA adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur minuman mengandung etil alkohol.
2. Penyalur MMEA adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai berupa MMEA yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata bukan ditujukan kepada konsumen akhir.
3. Tempat usaha penyalur MMEA adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai berupa MMEA yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
4. Penyalur MMEA yang telah mendapatkan izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan, wajib memiliki NPPBKC untuk kepentingan pengawasan Barang Kena Cukai dan penerimaan negara.
5. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, Penyalur MMEA terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan wawancara dan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
6. Setelah dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran data pemohon sebagai penanggung jawab dan data dalam lampiran pemohon yang dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha. Atas hasil pemeriksaan lokasi, pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disertai gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. BAP ini digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP.
7. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, Penyalur MMEA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format PMCK-6 disertai BAP, Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama Penyalur MMEA yang bersangkutan memiliki kesamaan dengan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama Penyalur MMEA lain yang telah mendapatkan NPPBKC dan persyaratan administrasi lainnya.
8. Terhadap permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud pada butir 8, maka :
  - a. kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;
  - b. dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC;
  - c. dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
9. SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC Penyalur MMEA dimulai sejak permohonan diterima kepala kantor untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, wawancara, pemeriksaan lokasi, pengajuan PMCK-6, pemeriksaan persyaratan sampai dengan penerbitan keputusan pemberian NPPBKC atau surat penolakan.
10. Unit pelaksana SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC Penyalur MMEA ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean.

**PERSYARATAN :**

1. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
  - a. salinan/fotokopi SIUP-MB;
  - b. gambar denah, lokasi, bangunan atau tempat usaha;
  - c. salinan/fotokopi IMB;
  - d. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
2. Lokasi, bangunan atau tempat usaha untuk Penyalur MMEA harus memenuhi ketentuan :
  - a. dilarang menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha penyalur yang dimintakan izin;
  - b. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah atau rumah sakit;
  - c. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kasawan perdagangan;
  - d. Memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi;
  - e. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha penyalur;
  - f. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA;
  - g. memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai; dan
  - h. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat
3. Penyalur MMEA mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format PMCK-6, disertai persyaratan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :
  - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat;
  - b. surat perjanjian sewa menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun, dalam hal Penyalur MMEA bukan pemilik bangunan;
  - c. izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
  - d. izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
  - e. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
  - h. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
  - i. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.
4. Penyalur MMEA yang telah mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm.
5. Penyalur MMEA yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai, guna penyusunan database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**BIAYA** : Tidak dipungut biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN :**

Pelayanan Pemberian NPPBKC bagi Penyalur MMEA dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yang dibagi dalam 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:

- |    |          |   |   |   |    |      |
|----|----------|---|---|---|----|------|
| 1. | Tahap I  | : | Wawancara dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan lokasi tempat usaha penyalur MMEA hingga pembuatan BAP disertai gambar denah sejak surat permohonan pemeriksaan lokasi diterima | : | 30 | Hari |
| 2. | Tahap II | : | Proses analisis permohonan dan lampiran sampai dengan terbitnya surat keputusan pemberian NPPBKC/surat penolakan sejak PMCK-6 diterima secara lengkap.                          | : | 30 | Hari |

Mengetahui:  
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

Kamil Sjoeib  
NIP 060044480